

**PERAN POLITIK LOKAL DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
KEBIJAKAN SEKOLAH DI MANADO**

Shelty D. M. Sumual¹, Marisca A. B. Sadsuitubun², Bella Felicita Rambitan³,
Syerri Y. Sumual⁴, Neiles Wakur⁵
Universitas Negeri Manado

Alamat e-mail : sheltysumual@unima.ac.id¹, mariscaangela24@gmail.com²,
rambitanb@gmail.com³, syerri.y.sumual@gmail.com⁴, neileswakur18@gmail.com⁵

ABSTRACT

This article aims to analyze the role of local politics in education policy decision-making in Manado using a literature study approach. This study identifies several factors that influence education policy decision-making at the local level, including the role of local political actors, the interaction between central and regional policies, the influence of local social and cultural forces, and accountability mechanisms in education policy management. The results show that local political actors, such as regional heads and legislators, significantly influence budget allocation and education policy priorities, which are often driven by political considerations. In addition, although the central government sets education policies, the implementation of such policies at the regional level is influenced by local political needs and interests. Local social and cultural influences also play a role in determining educational policies based on local wisdom. However, the main challenge is the limited decision-making accountability mechanism, which impacts policy transparency and effectiveness. For this reason, this study suggests the need to increase transparency and community participation in the decision-making process and strengthen supervisory capacity to increase accountability in education policy in Manado.

Keywords: local politics, education policy, decision-making, accountability, Manado.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran politik lokal dalam pengambilan keputusan kebijakan pendidikan di Manado, dengan pendekatan studi literatur. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan pendidikan di tingkat lokal, termasuk peran aktor politik lokal, interaksi antara kebijakan pusat dan daerah, pengaruh kekuatan sosial dan budaya lokal, serta mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan kebijakan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor politik lokal, seperti kepala daerah dan anggota legislatif, memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan alokasi anggaran dan prioritas kebijakan pendidikan, yang sering kali didorong oleh pertimbangan politik. Selain itu, meskipun kebijakan pendidikan ditetapkan oleh pemerintah pusat, implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah

dipengaruhi oleh kebutuhan dan kepentingan politik lokal. Pengaruh sosial dan budaya lokal juga memainkan peran dalam penentuan kebijakan pendidikan yang berbasis kearifan lokal. Namun, tantangan utama yang ditemukan adalah terbatasnya mekanisme akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, yang berdampak pada transparansi dan efektivitas kebijakan. Untuk itu, penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta penguatan kapasitas pengawasan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam kebijakan pendidikan di Manado.

Kata Kunci: politik lokal, kebijakan pendidikan, pengambilan keputusan, akuntabilitas, Manado.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Dalam konteks pemerintahan daerah, pendidikan memiliki posisi penting karena menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan di tingkat lokal (Cikka, 2020). Di Indonesia, kebijakan desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sektor pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Namun, dalam praktiknya, pengambilan keputusan di sektor pendidikan tidak lepas dari dinamika politik lokal yang kerap memengaruhi arah dan prioritas kebijakan (Naila & Effane, 2022). Hal ini juga terjadi di Manado, ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, yang memiliki beragam dinamika sosial, budaya, dan politik.

Kota Manado dikenal dengan keanekaragaman etnis dan agama yang hidup berdampingan secara harmonis. Kondisi ini menciptakan karakteristik unik dalam pengambilan kebijakan publik, termasuk di bidang Pendidikan. Dalam pengambilan

keputusan, pemerintah daerah sering kali harus mempertimbangkan berbagai kepentingan, baik dari kelompok politik, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya. Faktor politik lokal sering kali menjadi penentu utama dalam distribusi sumber daya, pengangkatan kepala sekolah, hingga penentuan program pendidikan berbasis kearifan lokal. Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama dalam hal bagaimana politik lokal membentuk arah kebijakan sekolah di Manado (Mantu, 2018).

Namun, pengaruh politik lokal dalam pengambilan kebijakan pendidikan tidak selalu berdampak positif. Di satu sisi, keterlibatan politik dapat mendorong lahirnya kebijakan yang relevan dengan kebutuhan lokal, seperti pengintegrasian nilai-nilai budaya dalam kurikulum. Di sisi lain, pengaruh politik yang berlebihan sering kali mengarah pada praktik-praktik patronase, seperti pengangkatan kepala sekolah berdasarkan afiliasi politik, bukan kompetensi. Akibatnya, kualitas pendidikan di beberapa sekolah menjadi tidak merata, dan

keberlanjutan kebijakan sering tergantung pada dinamika politik yang sedang berlangsung (Efendi & Sholeh, 2023).

Dalam konteks Manado, penting untuk melihat bagaimana politik lokal dapat berperan sebagai penggerak atau penghambat dalam pengembangan sektor pendidikan. Kebijakan yang seharusnya berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan politis yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana politik lokal memberikan dampak positif atau negatif terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan pendidikan di tingkat sekolah (Mawardi & Mesra, 2024).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran politik lokal dalam pengambilan keputusan kebijakan sekolah di Manado. Dengan pendekatan kualitatif, artikel ini berfokus pada bagaimana aktor-aktor politik, seperti pemerintah daerah, anggota legislatif, dan kelompok masyarakat, memengaruhi proses formulasi dan implementasi kebijakan pendidikan. Studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dinamika politik lokal di sektor pendidikan, serta menawarkan rekomendasi untuk menciptakan kebijakan yang lebih transparan, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode literatur review untuk menganalisis peran politik lokal dalam pengambilan keputusan kebijakan sekolah di Manado. Pendekatan literatur review dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai penelitian, dokumen kebijakan, dan sumber literatur yang relevan untuk memahami dinamika politik lokal dan hubungannya dengan sektor Pendidikan (Purba et al., 2024). Literatur yang dikaji mencakup jurnal ilmiah, laporan pemerintah, peraturan daerah (Perda), buku, dan artikel lainnya yang membahas kebijakan pendidikan, politik lokal, dan pengaruhnya di konteks Manado.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana politik lokal mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan sekolah di Manado. Berdasarkan studi literatur yang dilakukan, ditemukan beberapa faktor yang memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pendidikan di kota ini, yaitu: peran aktor politik lokal, interaksi antara kebijakan pusat dan daerah, pengaruh kekuatan sosial dan budaya lokal, serta

B. Metode Penelitian

mekanisme akuntabilitas dalam pengambilan keputusan tersebut.

1. Peran Aktor Politik Lokal dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Sekolah

Politisi lokal, terutama anggota DPRD dan kepala daerah, memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan arah kebijakan pendidikan di Manado. Studi literatur mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik aktor-aktor lokal, baik dalam hal distribusi anggaran maupun dalam hal pembentukan kebijakan yang lebih mendekati kebutuhan konstituen mereka (Rahmanto, 2021). Sebagai contoh, beberapa kebijakan yang ditetapkan di Manado berhubungan dengan alokasi dana untuk sekolah-sekolah tertentu yang lebih banyak didasarkan pada pertimbangan politik daripada pada kebutuhan pendidikan yang objektif.

2. Interaksi Kebijakan Pusat dan Daerah

Kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sering kali dipengaruhi oleh kekuatan politik lokal. Meskipun kebijakan pendidikan dasar dan menengah banyak dipengaruhi oleh regulasi nasional, namun implementasi dan pengelolaan kebijakan ini di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik lokal (Ali, 2017). Misalnya, kebijakan nasional yang melibatkan dana untuk pembangunan infrastruktur pendidikan atau pemberian beasiswa sering kali dipilih untuk memenuhi kebutuhan politik lokal, di mana kepala daerah atau anggota legislatif daerah akan memastikan bahwa kebijakan tersebut menguntungkan basis pemilih mereka (Zein, 2023).

3. Pengaruh Kekuatan Sosial dan Budaya Lokal

Dalam konteks Manado, kekuatan sosial dan budaya lokal, seperti pengaruh tokoh agama, adat, dan kelompok etnis tertentu, turut memainkan peran dalam menentukan kebijakan Pendidikan (Tuhuteru, 2022). Banyak keputusan yang melibatkan

integrasi antara nilai-nilai lokal dan kebijakan pendidikan, seperti penentuan kurikulum yang mencerminkan budaya lokal atau kebijakan untuk memperkuat peran sekolah dalam mendukung pelestarian bahasa daerah (Efendi & Sholeh, 2023). Hal ini menunjukkan bagaimana politik lokal berinteraksi dengan tradisi dan budaya setempat dalam pembentukan kebijakan pendidikan.

4. Mekanisme Akuntabilitas dalam Pengambilan Keputusan

Dalam sistem politik lokal di Manado, mekanisme akuntabilitas yang ada untuk pengambilan keputusan kebijakan pendidikan masih terbatas. Walaupun ada beberapa upaya untuk meningkatkan transparansi melalui laporan keuangan dan partisipasi publik dalam perencanaan kebijakan, kenyataannya, pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan kebijakan pendidikan belum sepenuhnya terwujud. Terdapat kesenjangan antara kebijakan yang diumumkan oleh pemerintah daerah dan implementasinya di lapangan,

yang sering kali disebabkan oleh kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (Legi et al., 2020).

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa politik lokal memainkan peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan kebijakan pendidikan di Manado. Politik lokal di sini berfungsi sebagai faktor penentu dalam pengalokasian sumber daya pendidikan, termasuk anggaran dan fasilitas pendidikan. Faktor-faktor seperti kekuatan politik lokal, pertimbangan pemilih, serta hubungan antara pemerintah daerah dan pusat berperan besar dalam menentukan kebijakan yang diterapkan di sekolah-sekolah.

Pengaruh Aktor Politik Lokal

Kekuatan politik lokal di Manado terbukti dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil dalam kebijakan pendidikan. Sebagai contoh, keputusan untuk membangun atau memperbaiki sekolah tertentu sering kali didasarkan pada pertimbangan politik yang lebih berkaitan dengan upaya memenangkan dukungan dari masyarakat lokal. Penentuan prioritas alokasi anggaran pendidikan juga tidak lepas dari faktor-faktor ini, yang lebih sering didorong oleh kepentingan politik ketimbang

kebutuhan pendidikan yang sesungguhnya (Sudiantini & Hadita, 2022).

Interaksi Kebijakan Pusat dan Daerah

Meskipun kebijakan pendidikan secara nasional diatur oleh pemerintah pusat, dalam implementasinya di daerah seperti Manado, pengaruh politik lokal menjadi sangat kuat. Pemerintah daerah sering kali mencoba untuk menyesuaikan kebijakan pusat dengan kondisi lokal dan kepentingan politik mereka. Hal ini dapat dilihat dalam hal bagaimana anggaran pendidikan digunakan, apakah lebih diarahkan untuk proyek pendidikan yang bisa memberikan keuntungan politik jangka pendek atau justru untuk pengembangan pendidikan yang lebih berkelanjutan dan efektif (Taniboyong & Prasasyaningsih, (2024).

Kekuatan Sosial dan Budaya Lokal

Pengaruh sosial dan budaya lokal di Manado menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya soal kurikulum dan kebijakan administratif, tetapi juga terkait dengan identitas dan nilai-nilai budaya masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan pendidikan yang berbasis pada kearifan lokal memiliki dampak yang signifikan dalam pembentukan karakter siswa (Ismail et al., 2020). Oleh karena itu, pengambilan keputusan dalam kebijakan pendidikan perlu lebih mempertimbangkan aspek budaya lokal, yang sering kali dipengaruhi oleh politik lokal.

Akuntabilitas dalam Pengambilan Keputusan

Meskipun mekanisme akuntabilitas di tingkat daerah sudah ada, seperti pelaporan anggaran dan partisipasi publik, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan terhadap implementasi kebijakan pendidikan belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kapasitas lembaga pengawas, terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan dominasi politik dalam pengelolaan anggaran Pendidikan (Setiawan, 2024). Oleh karena itu, untuk meningkatkan akuntabilitas, dibutuhkan peran serta masyarakat yang lebih besar, serta peningkatan kapasitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

E. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran politik lokal dalam pengambilan keputusan kebijakan pendidikan di Manado sangat dominan, dengan aktor-aktor politik lokal, seperti kepala daerah dan anggota legislatif, memainkan peran penting dalam menentukan alokasi sumber daya dan prioritas kebijakan pendidikan. Selain itu, interaksi antara kebijakan pusat dan daerah, serta pengaruh kekuatan sosial dan budaya lokal, turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan kebijakan pendidikan. Untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kebijakan pendidikan,

diperlukan upaya untuk memperkuat transparansi dan pengawasan dalam proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2017). Kebijakan pendidikan menengah dalam perspektif governance di Indonesia. Universitas Brawijaya Press.
- Cikka, H. (2020). Konsep-konsep esensial dari teori dan model perencanaan dalam pembangunan pendidikan. *Scolae: Journal of Pedagogy*, 3(2).
- Efendi, N., & Sholeh, M. I. (2023). Dinamika Sosial Dalam Proses Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Pendidikan Islam. *Attanwir: Jurnal Keislaman Dan Pendidikan*, 14(2), 45-67.
- Efendi, N., & Sholeh, M. I. (2023). Dinamika Sosial Dalam Proses Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Pendidikan Islam. *Attanwir: Jurnal Keislaman Dan Pendidikan*, 14(2), 45-67.
- Ismail, S., Suhana, S., & Zakiah, Q. Y. (2020). Analisis kebijakan penguatan pendidikan karakter dalam mewujudkan pelajar pancasila di sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 76-84.
- Legi, H. V., Rawis, J. A. M., Simanjuntak, S., & Oentoe, F. J. A. (2020). Model Implementasi e-Government di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado. *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, 3(2), 212-228.
- Manembu, A. E. (2018). Peranan perempuan dalam pembangunan masyarakat desa (suatu studi di desa Maumbi kecamatan Kalawat kabupaten Minahasa Utara). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 7(1).
- Mantu, R. (2018). Memaknai "Torang Samua Basudara"(Manajemen Dakwah Berbasis Kearifan Lokal di Kota Manado). *Potret Pemikiran*, 19(2).
- Naila, S., & Effane, A. (2022). Desentralisasi Manajemen Pembiayaan Dan Konflik Dalam Mahalnya Biaya Pendidikan. *Karimah Tauhid*, 1(1), 84-89.
- Purba, S. K., Annisa, A. M., Puandra, E. M., Everyanti, I. C., & Chairunisa, H. (2024). Literature Review: Bipa (Bahasa Indonesia Penutur Asing) sebagai Upaya Internasionalisasi Bahasa Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 8869-8875.
- Rahmanto, F. (2021). POLITIK ANGGARAN: ALOKASI DANA BANSOS PRA-PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI INDONESIA SEBAGAI ALAT MENINGKATKAN ELEKTABILITAS. *Jurnal Wacana Politik*, 6(1).
- Setiawan, I. (2024). PENGAWASAN PEMERINTAHAN Dalam Ulasan Teori Dan Praktek. CV. Rtujuh Media Printing.
- Sudiantini, D., & Hadita, S. P. (2022). Manajemen Strategi. Purwokerto: CV. Pena Persada.
- Taniboyong, A. T., & Prasasyaningsih, X. I. (2024, November). Dampak Penerimaan Asli Daerah dan Dana

- Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua. In Prosiding Seminar Nasional Forum Manajemen Indonesia-e-ISSN 3026-4499 (Vol. 2, pp. 1502-1513).
- Tuhuteru, L. (2022). Pendidikan Karakter Untuk Menjawab Resolusi Konflik. Cv. Azka Pustaka.
- Zein, M. H. M. (2023). Reformasi Birokrasi: Dunia Birokrasi dan Pemerintahan. Sada Kurnia Pustaka.